PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AAN SUHANAN**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **85555**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/80 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/80 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 1.750 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 483 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , Rp. 20.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 309 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 202.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, RENAULT TWIZY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 2.506.797.366

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.059.350.121
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	5.268.147.487
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.268.147.487

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.